

SEJARAH INDONESIA MASA PERGERAKAN

Oleh
Dina Dwikurniarini

PENGANTAR

Awal abad ke-20 merupakan babak penting dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Ada keinginan dari seluruh wilayah di Nusantara untuk menyatukan diri dalam suatu negara merdeka lepas dari kekuasaan kolonial Belanda. Suatu keadaan yang sangat penting dalam pembentukan sejarah bangsa. Sebelum ada keinginan dari tiap wilayah di negeri ini memang sudah ada berbagai bentuk usaha menyingkirkan orang asing sejak kedatangan mereka pada abad ke-15. Kepentingan agama, Kristenisasi dan ekonomi, rempah-rempah telah membawa Portugis ke dunia Timur¹, tetapi kemudian yang diutamakannya adalah perdagangan. Menguasai perdagangan dan monopoli rempah-rempah sampai kemudian tergeser oleh Belanda.

Bentuk perlawanan dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik yang dilakukan kerajaan-kerajaan di seluruh wilayah Nusantara. Perlawanan terhadap bangsa asing lebih tepat sebagai bentuk perlawanan untuk kepentingan ekonomi. Pada mula kedatangan bangsa asing memang untuk mendapatkan rempah-rempah dan perdagangan yang menguntungkan mereka, sehingga banyak kerajaan kecil yang merasa dirugikan dengan kedatangan bangsa asing. Akibatnya muncul perlawanan terhadap mereka dengan mencoba mengusir dari wilayahnya. Meskipun demikian berbagai usaha

¹Sartono Kartodirdjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasion l Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme a* Jilid 2. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 3-4.

melawan bangsa asing yang tercatat dalam sejarah ada yang berhasil. Diantara yang berhasil adalah: 1) Fatahilah, berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa tahun 1527 dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Selain itu Fatahilah juga berhasil menguasai Banten dan Cirebon bahkan kedua daerah tersebut dijadikan kerajaan Islam; 2) Sultan Baabullah pada tahun 1575 berhasil mengusir Portugis dari Maluku (Ternate) dan lari ke Timor Portugis (Timor Timur); 3) Sultan Nuku dari Tidore (1797-1885) dibantu Inggris berhasil merebut kota Soa Siu dari Belanda pada tahun 1801 dan menjadikan Maluku bersatu kembali. Perlawanan-perlawanan lain juga dilakukan meskipun mengalami kegagalan, seperti: 1) Pati Unus pada tahun 1512 menyerang Portugis; 2) Sultan Agung, raja Mataram pada tahun 1628-1629 menyerang Batavia; 3) Sultan Hasanuddin dikalahkan Belanda dengan politik adu domba melawan Aru Palaka dari Makasar dan keluarlah persetujuan Bongaya 1667; 4) Sultan Ageng Tirtayasa, raja Banten; 5) Kapten Pattimura atau Thomas Matulesi, 1817 dihukum gantung oleh Belanda di benteng Neiu Victoria; 6) Perlawanan Padri 1821-1837; 7) Pangeran Diponegoro berhasil membuat VOC kewalahan dalam menghadapinya dan perang antara Diponegoro dan Belanda disebut sebagai Perang Jawa 1825-1830; 8) perlawanan rakyat Aceh 1873-1904, dengan keluarnya Plakat pendek Aceh resmi dikuasai Belanda; 9) Sisingamangaraja dari Tapanuli, 1878-1907; 10) Pangeran Antasari dari Banjar 1859-1863; 11) Patih Jelatik dari Bali yang tidak berhasil melawan Belanda dan menjadikan seluruh Bali dikuasai Belanda pada 1849.

Perlawanan rakyat terhadap bangsa asing memang jika dilihat dari kemampuan persenjataannya kita kalah maju juga kelemahan strategi perang yang dipakai. Dalam menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara Belanda selalu menggunakan politik

divide et impera atau politik adu domba juga siasat yang licik. Tidak dapat kita pungkiri bahwa perlawanan yang sporadis dan bersifat kedaerahan adalah suatu usaha awal dari kesadaran bangsa atas kemerdekaan wilayahnya. Perlawanan yang tidak dilakukan secara serentak, menyebabkan Belanda mempunyai kesempatan untuk mengirimkan seluruh kekuatannya ke daerah yang bergolak. Sampai akhir abad ke-19 perlawanan terhadap kolonial masih mengandalkan kekuatan fisik. Bentuk perlawanan dilakukan per wilayah kerajaan dan belum ada kesatuan daerah sebagai bentuk negara.

Setelah muncul para orang-orang terpelajar dan dikenalnya faham-faham baru perlawanan terhadap kolonial tidak mengandalkan kekuatan fisik lagi tetapi melalui organisasi modern dengan melalui tulisan-tulisan di majalah dan orasi-orasi bebas.. Perlawanan model baru tersebut membuahkan simpati dunia akan kesengsaraan rakyat Indonesia akibat penjajahan.

II. Penjajahan di Indonesia

Dalam masa penjajahan baru di Indonesia ikut berkembang teori imperialisme yang menyatakan bahwa penjajahan itu baik karena mengandung pembudayaan bangsa terjajah yang umumnya terbelakang. Penjajahan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan misi suci (*mission sacree*)² yaitu untuk membudayakan orang pribumi. Penjajahan baru di Indonesia dapat dilihat dari dua tahap Politik Etis dan Politik Kolonial Baru.

²G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid I*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 21-22, lihat juga Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hal. 15.

1. Masa Politik Etis

Perkembangan perekonomian liberal di Nusantara yang melibatkan pengusaha swasta Belanda menuai banyak kritik di kalangan orang-orang Belanda moralis yang mempunyai simpati akan nasib rakyat jajahan. Salah satunya dari C van Deventer yang menuliskan kritiknya dalam tulisan yang berjudul *Een Eereschuld* atau suatu Utang Budi di majalah *de Gids* tahun 1899³. Dalam kritiknya dia mengemukakan bahwa kemakmuran negeri Belanda diperoleh karena kerja dan jasa orang Indonesia. Oleh karena itu Belanda berhutang budi kepada rakyat jajahan, maka bangsa Belanda sebagai negara maju dan bermoral haruslah membayar hutang tersebut dengan menyelenggarakan Trias Politika yaitu irigasi, emigrasi (transmigrasi) dan edukasi.

Pemerintah Belanda menanggapi kritik van Deventer dengan mengemukakan gagasan pembaharuan seperti dikemukakan Ratu Wilhelmina (1890-1948) dalam pidatonya tahun 1901 yang berjudul *Ethiasche Richting* (Haluan Ethika) atau *Nieuw Keurt* (Haluan Baru). Akan tetapi pelaksanaan politik tersebut tidak lepas dari kepentingan kolonial, sehingga sering dianggap sebagai “politik sarung tangan sutera” sebagai pengganti “politik sarung tangan besi”. Makna di dalam pengertian tersebut bahwa tidak ada perubahan karena hasilnya tetap sama, karena politik sarung tangan sutera sama artinya dengan perintah halus. Politik kolonial tersebut kadang juga disebut sebagai politik paternalistik, yaitu

³Suhartono. *Ibid*, hal. 16.

politik pemerintah yang ingin mengurus kepentingan anak negeri tanpa mengikutsertakan anak negeri sendiri. Kaum moralis liberal menanggapinya sebagai kewajiban bangsa yang maju terhadap bangsa terbelakang. Dengan demikian politik kolonial ethika merupakan pelaksanaan dari gagasan yang termuat dalam teori *mission sacree* atau *the white man's burder*. *Mission sacree* menjadi tugas suci dari orang kulit putih (Eropa) untuk memajukan peradaban bangsa kulit berwarna. Tugas itu disebutkan sebagai *the white man's burder* (beban orang-orang putih). Disini nampak bahwa bagi bangsa penjajah untuk dapat melegalkan dan membenarkan penjajahan mereka.

Haluan ethika lebih banyak hanya sebagai slogan saja, karena pada hakikatnya penjajah memberi hadiah dengan tangan kanannya dan mencabutnya kembali dengan tangan kiri. Akan tetapi politik ethika itu tetap dilakukan meski dengan tujuan kolonialistis-imperialistis yang berupa⁴:

- a. Kemakmuran yang lumayan, dalam hal ini berarti kemampuan membeli hasil industri Nederland seperti tekstil.
- b. Perbaikan kesehatan, berarti lebih mudah memperoleh tenaga kerja yang sehat
- c. Pengajaran, hanya dilaksanakan pada tingkat rendah dan sekedar memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja yang dapat baca tulis.
- d. Irigasi, dibangun di tempat yang ada perkebunannya.
- e. Pembangunan jalan dan jalan kereta api, untuk mendukung usaha perkebunan dan mempermudah pengawasan daerah pedalaman.

⁴G. Moedjanto, *log. cit.*

- f. Transmigrasi ke luar Jawa khususnya Sumatra, untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan.

Pelaksana pertama dari “Haluan Ethika” adalah Gubernur Jendral J.B. van Heutsz dan Prof. C. Snouck Hurgronje, sebagai asistennya yang menganjurkan bahwa haluan tersebut bersemboyan “unifikasi” Indonesia-Belanda dengan “asosiasi dan asimilasi”. Bangsa Indonesia akan di-Belanda-kan, sehingga ikatan Indonesia-Belanda dapat abadi. Akan tetapi politik tersebut mendapat tentangan dari berbagai kalangan di Belanda terutama yang menganggap Belanda adalah superior. Mereka khawatir kemajuan Indonesia akan membahayakan kelangsungan ikatan Indonesia-Belanda.

Belanda tetap membatasi Indonesia dalam bidang ekonomi yaitu dengan tidak memberi bantuan pada pengusaha pribumi dan dalam bidang politik, membatasi hak pribumi untuk menduduki jabatan-jabatan penting. Demikian pula dalam bidang pendidikan juga tidak mendapat kesempatan bagi lulusan untuk ditempatkan. Politik etis pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah Belanda di tanah jajahan yang dilaksanakan atas nama kemanusiaan. Pendidikan tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat tetapi hanya untuk memenuhi kepentingan Belanda semata bukan untuk mencerdaskan bangsa jajahannya.

2. Politik Kolonial Baru

Akibat kegagalan politik kolonial ethika tersebut, dilaksanakan politik baru sesudah Perang Dunia I, yang disponsori oleh Universitas Leiden dengan tokoh-tokoh seperti Snouck Hurgronje, van Vollenhoven, Boeke, dll. Dalam bidang

politik Belanda cenderung memberikan otonomi pada Indonesia. Di bidang ekonomi, muncul gagasan untuk menyusun teori ekonomi yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Dalam bidang hukum mulai dikembangkan Hukum Adat.

Dengan kemenangan partai liberal dalam revolusi di Perancis pada Februari 1848, berpengaruh sampai ke Nederland. Ajaran liberalisme bidang ekonomi menghendaki dilaksanakannya usaha-usaha bebas dan pembebasan kegiatan dari campur tangan negara atau pemerintah. Liberalisme menghendaki dihapuskannya *cultuurstelsel*, sebagai satu prinsipnya. Para pengusaha termasuk dalam kelompok tersebut yang menginginkan dilaksanakan usaha bebas, karena abad 19 industri telah berkembang di Nederland. Tokoh-tokohnya F Van de Putte, de Waal, Thorbecke dan lain-lain. Kelompok lain yang menghendaki dihapusnya *cultuurstelsel* adalah golongan Humanis. Mereka melihat kehidupan yang menyedihkan rakyat Indonesia karena *cultuurstelsel* tersebut. Mereka itu adalah Baron van Hoevel, ia membela rakyat Indonesia dalam pidato di DPR Nederland; E Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli (artinya sama dengan yang banyak menderita), menulis karangan Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda. Buku Multatuli menerangkan secara terbuka bagaimana sengsaranya rakyat Indonesia karena *cultuurstelsel*. Setelah rakyat Nederland membaca buku tersebut mereka merasa ditipu pemerintah, karena kekayaan yang mengalir bukan karena kerjasama dengan rakyat di negeri seberang, melainkan hasil penindasan. Golongan humanis menentang *cultuurstelsel* bukan karena prinsip, tetapi karena akibat penyelewengan dari prinsip *cultuurstelsel* sebenarnya.

Kritik yang dilontarkan golongan Humanis dan Liberal, menyebabkan sedikit demi sedikit cultuurstelsel dihapuskan. Tahun 1870 sebagai batas akhir pelaksanaan cultuurstelsel, karena tahun itu juga keluar Undang-Undang Agraria. Undang Undang tersebut mengatur penggunaan tanah pihak pengusaha dan Undang Undang Gula yang mengatur pemindahan perusahaan-perusahaan gula ke tangan swasta. Dengan berakhirnya cultuurstelsel, maka di Indonesia dilaksanakan politik liberal atau imperialisme moderen.

Penderitaan rakyat Indonesia tidak berakhir dengan hapusnya cultuurstelsel, karena masa industrialisasi tingkat hidup rakyat tetap dipertahankan rendah untuk mendapatkan tenaga buruh yang murah. Disini industri tidak dikembangkan secara luas supaya tidak merugikan industri Netherland dan untuk menghindari munculnya kelas buruh yang kuat. Sifat masyarakat yang agraris tetap dipertahankan dan dijaga jangan sampai timbul kelas menengah pribumi (borjuis nasional). Pelaksanaan imperialisme moderen di Indonesia karena adanya beberapa sebab⁵:

- a. Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah
- b. Banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan cultuurstelsel yang berlebihan atau karena bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha pertanian, pertambangan dan transportasi
- c. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah

Dengan demikian fungsi Indonesia bagi Netherland adalah:

⁵*Ibid.* hal. 20.

- 1) pasar bagi hasil industri negeri Belanda; 2) penghasil bahan mentah untuk industri Belanda; 3) tempat penanaman modal yang berlebihan dengan tenaga buruh murah; 4) penghasil bahan konsumsi (untuk kenikmatan).

Dengan melihat fungsi Indonesia adalah suatu kenyataan kehidupan sosial yang dualistis dan kontradiktif, disatu pihak kehidupan sosial ekonomi baik bagi pegawai Belanda dan pengusaha Barat, tetapi tetap jelek bagi kebanyakan rakyat Indonesia. Dapat dikatakan bangsa Indonesia tetap seperti masa prakapitalisme. Masyarakat Indonesia tetap sebagai masyarakat kolonial karena ciri-ciri seperti yang dikemukakan antropolog Amerika Reymond Kennedy tetap ada pada bangsa Indonesia⁶, yaitu:

- a. Diskriminasi terhadap bangsa berwarna yang dianggapnya inferior (lebih rendah)
- b. Subordinasi (ketaatan) politik dari bangsa pribumi terhadap kekuasaan negara penjajah
- c. Ekonomi yang tergantung pada penjajah
- d. Kurangnya kontak sosial antara rakyat dan penguasa
- e. Kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan rakyat

Dalam politik kolonial baru terdapat prinsip yang dipegang teguh yaitu memisahkan negara dan swasta, sehingga pemerintah tidak berpegang pada politik kesejahteraan masyarakat jajahan.

⁶*Ibid.* hal.

Dampak dari politik baru tersebut, bangsa Indonesia semakin mengenal berbagai ide Barat, seperti liberalisme, demokrasi, hak-hak asasi manusia dan berbagai paham kebebasan. Dengan demikian makin banyak juga lahir kaum terpelajar Indonesia yang mulai memahaminya sebagai kenyataan yang ada di Indonesia.

3. Perubahan Sosial di Indonesia

Sebelum 1900, masyarakat Hindia Timur terdiri dari orang Eropa, Cina dan Arab serta Indonesia atau pribumi. Kepemimpinannya (elite) dibedakan antara tradisional dan moderen (pemerintah). Jawa menjadi bagian utama kekuasaan kolonial di bawah Parlemen Belanda (Staten Generaal) yang ditangani oleh Menteri Urusan Jajahan yang bertanggung jawab atas politik kolonial dan sanggup mempengaruhi segala keputusan.

Sesudah 1870 komposisi masyarakat Eropa di Jawa berubah karena cepatnya jumlah warga sipil yang masuk ke Jawa, sebelumnya hanya pegawai pemerintah dan administratur. Sekarang muncul masyarakat Eropa Baru yang bekerja untuk diri sendiri atau perusahaan, sehingga mereka menciptakan kehidupan lain dari masyarakat sebelumnya. Mereka adalah masyarakat yang berpendidikan, dari golongan menengah dan membawa kebudayaan barat, termasuk didalamnya adalah wanita Eropa yang menjadikan mereka eksklusif. Mereka adalah orang-orang baru yang prihatin atas merosotnya kemakmuran rakyat, sangat tersinggung atas pengawasan pemerintah, mereka juga menuntut mengurus persoalannya sendiri dan

menuntut pemerintah memberi otonomi dalam keuangan. Dari keadaan ini kemudian muncul politik etis atau hutang budi pemerintah Belanda pada koloninya.

Orang Arab dan Cina, mereka adalah orang yang mengusahakan hidup dengan melalui orang Indonesia yaitu sebagai perantara dalam struktur ekonomi nusantara. Jumlah orang Cina di Jawa pada tahun 1900 sekitar 280.000 jiwa⁷. Tahun 1900an mereka menuntut perbaikan nasib, mereka juga mengilhami kekuatan-kekuatan laten dalam masyarakat Indonesia. Pada tahun yang sama jumlah orang Arab 18.000 jiwa⁸, mereka adalah pedagang kecil, saudagar dan peminjam uang dari orang Cina. Keuntungan mereka didapat dari orang Cina, tetapi mereka mempunyai ikatan keagamaan dengan orang Indonesia.

Orang Indonesia dapat dikelompokkan sebagai 1) petani jumlah mereka terbesar dan tinggal dipedesaan, 2) Pegawai pemerintah dan orang-orang berpendidikan termasuk bangsawan atau priyayi. Mereka juga sebagai kaum pembaharu yang bertujuan ingin meremajakan Islam agar tidak tunduk pada kemajuan Barat dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan serta kembali pada ajaran dan tafsir Islam sebagai kemajuan. Mereka juga menginginkan memurnikan Islam dan keimanan penganutnya serta membersihkan mistik. Dalam pengajaran guru-guru dalam negeri (tradisional) berhadapan dengan guru-guru berpendidikan Barat. Terjadi pergolakan samar-samar dalam kehidupan karena perbedaan penafsiran dan guru tradisional takut kedudukannya akan terancam. Kedua kelompok tadi di kota

⁷Robert Van Niel. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Terjemahan Ny. ZaharaDeliar Noer.(Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hal. 28.

⁸*Ibid.*, hal 29

masih ditambah kelompok 3) yaitu Pembantu Rumah tangga Eropa/keluarga Indonesia terkemuka, mereka ada pada lapisan tinggi karena dianggap turut dalam kedudukan dan sukses majikannya; 4) mereka yang bekerja pada kantor pemerintah; 5) orang Indonesia yang berdagang atau punya usaha kecil dan 6) buruh kasar, pekerja pendatang, kuli, penjaga⁹.

Masyarakat tradisional Indonesia dengan ekonomi tradisionalnya menempatkannya sebagai kelas tersendiri dalam masyarakat kolonial, mereka mempunyai unsur hakiki sebagai ketradisionalannya

Politik etis dalam reunifikasi dan asosiasi tetap menjadi harapan penganutnya untuk memperkokoh sistem perpajakan. Melalui penambahan dan perbaikan pendidikan orang Indonesia dilakukan sehingga tahun 1900 Hoofden Scholen disesuaikan dengan Sekolah-Sekolah Menengah lain dan diberi nama Sekolah Untuk Mendidik Pamong Pribumi (OSVIA), tetapi sekolah menengah lain mengalami berbagai reorganisasi dan OSVIA mengalami ketertinggalan. Pemerintah mulai membuka pula sekolah dasar Eropa untuk orang Indonesia. Para priyayi mengirimkan anak-anaknya ke sekolah orang Eropa supaya dapat berada dalam barisan kedudukan yang baik dalam pemerintahan. Tujuan sekolah adalah mendapat putra-putra pribumi terbaik yang menurut Snoeck Hurgronje adalah memajukan proses asosiasi. Snoeck Hurgronje beranggapan merupakan alat dalam

⁹Peter Boomgaard. *Anak Jajahan Belanda Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*, terjemahan dari judul asli "Children of The Colonial State: Population Growth and Economic Development of Java, 1795-1880, penerjemah: Monique Soesman dan Koesalah Soebagyo Toer,(Jakarta: KITLV, 2004), hal 9.

menguasai sebagian ningrat Banten dan ia berhasil. Anak didik percobaannya adalah Achmad Djajadiningrat dan adiknya Husein menjadi lebih sukses lagi setelah menempuh pendidikan di Leiden dalam bidang sastra dan ilmu pengerahuan liberal.¹⁰

Proses mengembangkan pemimpin-pemimpin orang Jawa yang berpendidikan Barat mulanya tidak dapat kerjasama dan kadang bertentangan dalam arti takut dapat pengaruh, sebaliknya dalam kedudukan sosial anak-anak mereka lebih banyak celaka dari pada sebelumnya. Tahun 1906 pemerintah banyak memberi kesempatan menunjukkan niat baiknya sehingga tentangan makin berkurang. Sesudah tahun tersebut kemajuan makin bertambah dikalangan orang-orang Indonesia, misalnya Wiranatakusuma tidak tamat dari OSVIA tetapi mendapat kedudukan tinggi dan menjadi tokoh dalam kehidupan di Jawa Barat. Dari keraton Pakualaman ada Pangeran Notodirdjo, Kusumayuda belajar di Leiden, Noto Suruto menjadi penyair Indonesia. Di Jepara ada Sosro Kartono (kakak Kartini), yang kemudian belajar mistik dan menjadi paranormal. Dokter Rivai dari Minangkabau, lulusan STOVIA, menentang ketidakadilan dengan mendirikan Majalah Mingguan Bintang Hindia, publikasinya telah mengesankan Gubernur Jendral van Heutzer dan merupakan Majalah pertama Melayu yang menggunakan konsep jurnalistik Barat.

Snoeck bukan satu-satunya orang yang mempunyai perhatian seperti itu terutama dalam pendidikan, karena ada Abendanon, Engelenberg, van Lith, Hardeman dan lain-lain. Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia awal abad ke

¹⁰*Ibid.*, hal. 44-45.

20 merupakan kondisi menarik, karena pemerintah kolonial dihadapkan pada tuntutan-tuntutan masyarakat jajahannya. Kehidupan Barat ikut menyulut perubahan dalam masyarakat, karena orang-orang pribumi yang berpendidikan justru mengkhawatirkan keadaan tersebut. Masyarakat kolonial juga mulai memasuki perekonomian kapitalis yang mulai menggeser perekonomian tradisional

III. Peranan Elit Moderen Indonesia

Dalam struktur masyarakat di Indonesia sejak 1900 sampai sekarang diakui terdapat dua tingkat. Pertama adalah petani merupakan masyarakat desa dan kampung yang berjumlah paling banyak sekitar 90%, mereka juga dikategorikan sebagai rakyat jelata atau massa. Kedua adalah administratur atau pegawai, termasuk didalamnya adalah priyayi dan kaum terpelajar atau mereka yang mempunyai pendidikan atau disebut elite. Elite Indonesia juga dibedakan antara tradisional, yaitu orientasinya kosmologis berdasar keturunan dan elite moderen, orientasinya lebih pada negara kemakmuran dan pendidikan jadi lebih beraneka ragam. Elite moderen dibedakan menjadi elite fungsional dan elite politik. Elite fungsional, mengabdikan diri untuk kelangsungan berfungsinya suatu negara dan masyarakat modern, sedang elite politik adalah orang-orang Indonesia yang terlibat dalam aktivitas politik untuk berbagai tujuan.

Menurut van Niel, istilah Elite Indonesia agak menggelikan karena tidak ada kesatuan yang dikenal sebagai Indonesia baik dalam pengertian politik dan sosial pada awal abad ke 20. Tidak pula seluruh kepulauan Hindia Timur/kepulauan Indonesia sama pentingnya dalam perkembangan yang dibahasnya. Pada

kenyataannya di Jawa dan Madura, merupakan titik pusat kegiatan politik, administrasi dan ekonomi untuk Hindia Belanda. Jawa juga sebagai pusat penduduk (70%) dari seluruh penduduk Indonesia. Suku Jawa terbesar (ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur) yang berjumlah 17.000.000, suku Sunda di Jawa Barat 7.000.000, Madura 3.000.000. Elite Indonesia melakukan seluruh aktivitasnya yang dipusatkan di Jawa.

Mereka yang dimasukkan dalam kelompok elite moderen adalah mereka yang mempunyai pendidikan lebih tinggi, tetapi mereka bukan semata-mata akibat sistem etika kolonial. Elite adalah orang yang berkedudukan di atas orang kebanyakan, yang dalam batas-batas tertentu mampu membimbing, mempengaruhi, memimpin atau memerintah. Elite secara teoritis dapat dikelompokkan secara berpasangan sebagai berikut¹¹:

- a. berdasar corak waktunya: tradisional (lama) dan baru (moderen, intelektual)
- b. berdasar asal-usul: keturunan, pendidikan
- c. berdasar daerah kedudukan: desa-kota
- d. berdasar semangat kebatinannya: religius-sekuler
- e. berdasar fungsinya: fungsional birokratik-politik

Di dalam kenyataan batas-batas tersebut sangat kabur dan bisa jadi seorang dapat masuk beberapa kategori sekaligus. KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dapat disebut elite religius sekaligus moderen jika dilihat apa yang dilakukannya

¹¹G. Moedjanto, *Dari Pembentukan Pax Nederlandica Sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: USD, 2003), hal. 26.

untuk kemajuan pendidikan. Ki Hajar Dewantara dapat disebut sebagai elite tradisionanl dan keturunan, elite moderen maupun elite politik.

Mereka yang dikelompokkan sebagai elite intelektual adalah pendukung utama pergerakan kebangsaan. Mereka muncul dalam masyarakat Indonesia berkat perkembangan pendidikan Barat. Sejak abad ke-19 pendidikan Barat telah dikembangkan di Indonesia, mulai dari sekolah desa, sekolah dasar, sekolah guru, sekolah juru kesehatan, sekolah priyayi. Sekolah-sekolah itu mampu menghasilkan elite yaitu sekolah guru, sekolah juru kesehatan dan sekolah priyayi, Akan tetapi mereka yang menonjol dalam pergerakan adalah yang dari sekolah juru kesehatan dan priyayi.

Sekolah juru kesehatan didirikan tahun 1851 yang pada akhir abad ke-19 telah menghasilkan tenaga medis yang sering disebut dokter, Wahidin dan Rivai adalah contohnya. Sekolah tersebut terus dikembangkan dan pada 1902 menjadi STOVIA (School tot Opleiding van Indischse Artsen) sebagai sekolah untuk mendidik dokter pribumi. Sekolah priyayi atau sekolah *menak* adalah sekolah yang mendidik anak-anak priyayi untuk menjadi pegawai kolonial, pangreh praja. Dari kedua sekolah tersebut lahir tokoh-tokoh Sutomo, Gunawan, Suraji dari STOVIA dan Tirtokusumo, Kusumo Utoyo, Wiranatakusumah dari sekolah priyayi.

Elite baru juga lahir dari sejenis SMP dan SMA yang dikembangkan oleh pemerintah, lulusannya menjadi semakin banyak setiap tahunnya. Pada tahun 1913 di Surabaya didirikan NIAS (Nederlandsche Indische Artsen School), sejenis STOVIA yang nanti menjadi Fakultas Kedokteran Airlangga. Pada tahun 1926 di Jakarta berdiri Sekolah Tinggi Kedokteran yang bersifat universiter dan bergabung

dengan STOVIA dan nantinya berkembang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di Bandung berdiri ITB yang meluluskan tokoh Soekarno, Suratin dan Anwari, di Jakarta juga berdiri Sekolah Tinggi Hukum, yang meluluskan Muh. Yamin, Sudarisman Purwokusumo.

Dari sebagian elite intelektual kita mengenalnya sebagai pendiri bangsa, yang dari merekalah lahir pemikiran akan pemecahan masalah berkaitan dengan penderitaan rakyat jajahan. Mereka adalah pejuang bangsa yang melawan kekuasaan pemerintah dengan model baru yaitu dengan mendirikan organisasi massa dan melakukan kritik dengan berbagai cara terhadap pemerintah.